

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM OPTIMALISASI PENGGUNA ANGGARAN KERJA DI KANTOR DINAS BAPPEDA KABUPATEN PUNCAK ILAGA PROVINSI PAPUA TENGAH

Roberthair Suripatty dan La Ode Rajamin

Universitas Victory Sorong

email : rsuripatty65@gmail.com dan odejamin@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing pemerintah daerah diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih dengan adanya otonomi daerah. maka penulis menemukan rumusan masalah yaitu: Bagaimana Analisa Penerapan Akuntansi Pemerintah Dalam Optimalisasi Pengguna Anggaran Kerja di Kantor Dinas Bappeda Kabupaten Puncak Ilaga Provinsi Papua Tengah. secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Desentralisasi Fiskal, Dinas Bappeda Kabupaten Puncak Ilaga Provinsi Papua Tengah, Otonomi Daerah.

PENDAHULUAN

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tercapainya

sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta sasaran satuan kerja lain, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Puncak Ilaga Provinsi Papua Tengah sehingga tercapainya sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Puncak Ilaga Provinsi Papua Tengah. Penyusunan anggaran kerja merupakan kegiatan rutin di sektor pemerintahan, dan anggaran kerja yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama Bappeda Kabupaten Puncak Ilaga harus disajikan dengan jelas, terutama dalam hal maksud dan tujuan. Strategi yang dilakukan dalam tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan efisien dapat mengakibatkan kegagalan dalam perencanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya suatu entitas.

Dalam akuntansi berbasis akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Fenomena terakhir terkait dengan pertanggung jawaban APBD oleh entitas peloporan dan entitas akuntansi adalah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dibidang pemerintahan, termasuk dibidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu mengembangkan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien dan akuntabel. Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Puncak Ilaga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan anggaran kerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standandar akuntansi pemerintah, standard akuntansi pemerintah yang selanjutnya di singkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hokum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi keuangan pemerintahan sekarang memasuki Era Desentralisasi, maka pelaksanaan akuntansi pemerintah itu ada di daerah-daerah (provinsi ataupun Kabupaten), kemudian daerah-daerah tersebut menyampaikan laporan pemerintah pusat. Oleh pemerintah dibuatkan menjadi laporan konsolidasi yang merupakan laporan keuangan pemerintah RI. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu system informasi pengidentifikasi, pencatatan, pengklasifikasian, Untuk perlakuan akuntansi keuangan daerah penyusunannya harus mengikuti PSAP yang telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tanggal 13 juni 2005, yaitu PSAP Nomor 1 sampai dengan nomor 11, dimana hasil proses akuntansinya adalah:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Anggaran

Dalam penyusunan sebuah anggaran sebuah instansi dapat menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan ini merupakan perkembangan atas kelemahan pendekatan yang telah digunakan sebelumnya. Seluruh instansi dapat memilih pendekatan penyusunan anggaran yang paling tepat dan sesuai dengan karakteristik instansi dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan tradisional memiliki beberapa kelebihan, yaitu dari bentuknya yang sangat sederhana dan mudah untuk di implementasikan.

Hubungan Anggaran Keuangan dan Akuntansi

Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Dalam anggaran harus terdapat inovasi dan fleksibilitas untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak diduga. Angka-angka yang dianggarkan dapat dinyatakan dalam dolar, unit, jam, dan karyawan. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari satuan usaha ekonomi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam hal inilah alternatif dari suatu keadaan. Untuk menyediakan data, maka setiap transaksi perlu digolonggolongkan, diringkas dan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Dengan demikian jika dihubungkan dengan anggaran, data akuntansi merupakan salah satu sumber utama.

METODE

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara: Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan dengan penelitian ini.
2. Observasi: Mengamati secara langsung-tanpa mediator-sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca literature, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data:

1. Reduksi Data
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Penyajian Data
Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data
3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)
Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. Melalui beberapa strategi penelitian secara kualitatif interaktif dan informan dari hasil wawancara tersebut

HASIL

Penelitian ini adalah tentang Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Dalam Optimalisasi Pengguna Anggaran Kerja Di Kantor Dinas Bappeda Kabupaten Puncak Ilaga Provinsi Papua Tengah, dimana pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Bappeda Kabupaten Puncak Ilaga Provinsi Papua Tengah. Informan

penelitian dipilih menggunakan teknik key person yaitu informan yang dapat memberi petunjuk lebih mendalam tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan. Meliputi yaitu :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Optimalisasi Pengguna Anggaran Kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah Ilaga harus menerapkan akuntansi pemerintah dalam penggunaan anggaran kerja. Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ilaga menyusun laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas penggunaan anggaran kerja, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya yang pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran kerja pemerintah daerah dan mengungkapkan secara penuh kegiatan yang ada dengan sumberdaya yang menunjukkan ketaatan pada Peraturan Perundang - undangan. Seperti yang diungkapkan oleh kepada badan BAPPEDA.

“Ia, Penerapan sistem akuntansi pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh pemerintah, mengingat bahwa standar akuntansi pemerintahan dalam penggunaan anggaran kerja ini merupakan hal yang perlu diperhatikan maka pegawai Bappeda perlu meningkatkan kinerja kerja yang baik “.

Penyiapan peraturan pelaksanaan, kebijakan akuntansi dan sistemnya sudah harus ada serta sosialisasi lanjutan pada pemerintah daerah. dilakukan capacity building atau peningkata kualitas sumber daya manusia dengan sosialisasi dan pelatihan serta dilakukan lanjutan pengembangan sistem kemudian implementasi percobaan sistem di beberapa pemerintah daerah telah dilakukan. Pada implementasi paralel akuntansi pemerintah dan akuntansi kas menuju akrual untuk seluruh SKPKD hingga penerapan basis akrual “.

2. Optimalisasi Sistem Akuntansi Pemerintah Yang Akurat

Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ilaga penggunaan anggaran kerja berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya yang pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran kerja pemerintah daerah dan mengungkapkan

secara penuh kegiatan yang ada dengan sumberdaya yang menunjukkan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan.

“Kita pun ada kebijakan akuntansinya sendiri juga, harus sesuai juknis (petunjuk teknis), ada juga namanya Bagan Akun standar (daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait penggunaan anggaran kerja yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah)“.

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas Bappeda kabupaten Ilaga. Sedangkan untuk proses penggunaan anggaran kerja harus tersusun sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Oleh karena itu informasi dalam penggunaan anggaran kerja harus jelas pemakaiannya, informasi dalam penggunaan anggaran kerja yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, penggunaan anggaran kerja hanya akan bermanfaat jika penggunaan anggaran kerja yang diinformasikan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan.

KESIMPULAN

1. Kinerja Bappeda Kabupaten Ilaga dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Ilaga tahun 2024 belum optimal yang diukur dari indikator berupa: (a) masukan (input) berupa ketercukupan anggaran kerja, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), dan sarana prasarana yang didukung; (b) proses (process) perencanaan pembangunan meliputi 4 tahap yaitu penyusunan rencana awal, pelaksanaan kerja, perumusan perencanaan akhir, dan penetapan rencana.
2. Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.
3. Kabupaten Puncak Ilaga Provinsi Papua Tengah, dimana Bappeda terdiri dari tiga bidang, yaitu: bidang fisik tugasnya merencanakan paket pekerjaan fisik contohnya jalan raya, jembatan, pembangunan gedung-gedung dan rumah-rumah, bidang sosbut tugasnya menangani sekolah-sekolah bantuan social, pemberdayaan masyarakat, festival seni dan budaya, kesehatan.

SARAN

1. Disarankan agar peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian seperti melakukan penelitian di instansi pemerintahan lainnya.
2. Disarankan agar perlu ditingkatkan SDM pegawai.

DAFTAR ISI

- Udin Syaefudin, Abin syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hal. 3-4
- Makmur, Asmilia. 2004, *Gambaran Proses Perencanaan Anggaran Dengan Format Rencana Anggaran Satuan Kerja di Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Kotamadya Jakarta Selatan tahun 2004*, [Skripsi]. Program Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok
- Murti, Bisma et al., 2006, *Perencanaan dan Penganggaran untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Dina, Gemelly Rama. 2014. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai Variabel Moderating pada Bank Negara Indonesia 46 Di Palembang*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Nafarin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, R.A. 1990. *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya Serta Pembuatan Keputusan*, Edisi 2 Buku 2. Yogyakarta: BPFE.